

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Wilayah Kabupaten Karanganyar

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten ada di Kecamatan Karanganyar. Secara geografis, wilayah Kabupaten Karanganyar terletak pada titik koordinat $110^{\circ}40'$ - 110° Bujur Timur dan $7^{\circ}28'$ - $7^{\circ}46'$ Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Karanganyar berupa dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 511 meter di atas permukaan air laut (dpal). Daerah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu dengan ketinggian mencapai 1.200 mdpl sedangkan daerah terendah berada di Kecamatan Jaten dengan ketinggian hanya 95 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar sebesar $767,76 \text{ km}^2$ atau 76.530,59 hektar dengan penggunaan lahan terdiri dari tanah pertanian seluas 16.128,55 hektar dan tanah non pertanian seluas 60.362,05 hektar.

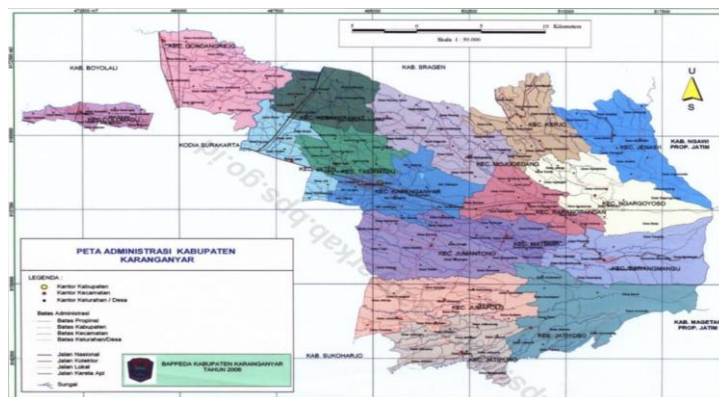
Wilayah Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota, dimana Kabupaten Karanganyar ini berada di wilayah timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Karanganyar dikenal dengan julukan "Bumi Intanpari" karena memiliki keunikan yaitu pesona yang memadukan antara kekayaan alam pegunungan dengan jejak sejarah sakral yang terletak

di wilayah Lereng Gunung Lawu. Adapun batas-batas administratif untuk Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
2. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Magetan
3. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo

Adapun batas-batas wilayah tersebut dapat dilihat pada peta Kabupaten Karanganyar yang ada di bawah ini:

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Karanganyar



Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026

Kabupaten Karanganyar memiliki iklim tropis dengan temperatur berkisar antara 22°-31° celcius sehingga suhu udaranya relatif sejuk. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketinggian wilayahnya yang bervariasi antara 95 mdpl hingga 1.200 mdpl, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan di lereng Gunung Lawu dan kondisi curah hujan yang relatif tinggi sebesar 478,67 mm setiap tahunnya juga turut mendukung kesuburan tanah dan kenyamanan iklim bagi daerah ini. Wilayah dengan

ketinggian lebih tinggi berada di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Jenawi, sedangkan kawasan dengan ketinggian lebih rendah terdapat di Kecamatan Jaten dan Kebakkramat.

Secara administratif, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 177 desa/kelurahan (15 kelurahan dan 162 desa) dengan luas wilayah antar kecamatan bervariasi. Pembagian Kecamatan di Kabupaten Karanganyar beserta luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Jatipuro	34,37	4,48%
2	Jatiyoso	67,16	8,75%
3	Jumapolo	55,67	7,25%
4	Jumantono	53,55	6,97%
5	Metesih	26,27	3,42%
6	Tawangmangu	70,03	9,12%
7	Ngargoyoso	65,34	8,51%
8	Karangpandan	34,11	4,44%
9	Karanganyar	43,03	5,60%
10	Tasikmadu	27,60	3,59%
11	Jaten	25,55	3,33%
12	Colomadu	15,64	2,04%
13	Gondangrejo	56,80	7,40%
14	Kebakkramat	36,46	4,75%
15	Mojogedang	53,31	6,94%
16	Kerjo	46,82	6,10%
17	Jenawi	56,08	7,30%
	Total	767,79	100%

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026

Dari 17 kecamatan yang ada, wilayah terluas berada di Kecamatan Tawangmangu dengan luas 70,03 km² atau sekitar 9,12% dari total wilayah Kabupaten Karanganyar sedangkan Kecamatan Colomadu menjadi wilayah dengan luas tersempit dengan luas hanya sekitar 15,64 km² sekitar 2,04% dari luas total wilayah Kabupaten Karanganyar.

Letak Kabupaten Karanganyar tergolong strategis karena berada di kawasan timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Posisi ini menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah penyangga pertumbuhan bagi Kota Surakarta sekaligus bagian dari kawasan pengembangan regional Solo Raya. Akses jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan Kota Surakarta dengan wilayah Jawa Timur turut mendorong pertumbuhan kawasan industri, perdagangan, dan permukiman, khususnya di Kecamatan Jaten, Gondangrejo, dan Colomadu.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Karanganyar dikelilingi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan dengan ikon utama Gunung Lawu yang membentang di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Jenawi. Selain itu, terdapat pula berbagai objek wisata alam seperti Air Terjun Grojogan Sewu dan kawasan hutan wisata dan objek wisata budaya seperti Candi Cetho dan Candi Sukuh serta Museum Dayu yang memperkuat karakter daerah ini sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya.

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sumber daya yang beragam dan cukup melimpah, terutama pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Sektor pertanian berkembang di wilayah dataran tinggi dengan komoditas hortikultura, sedangkan sektor industri banyak tumbuh di kawasan perbatasan dengan Kota Surakarta. Sementara itu, potensi pariwisata alam dan budaya terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian daerah. Dukungan letak geografis yang strategis serta keterkaitan dengan kawasan Solo Raya menjadikan Kabupaten

Karanganyar sebagai salah satu daerah yang memiliki prospek pertumbuhan yang cukup pesat di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografis

Kabupaten Karanganyar pada pertengahan tahun 2025 tercatat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 968.484 jiwa (Hasil Sensus Penduduk, 2025). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar 0,68%. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 486.010 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 482.474 jiwa. Data jumlah penduduk tersebut selanjutnya dapat dirinci berdasarkan wilayah kecamatan dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada gambar di bawah:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Kecamatan <i>District</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jatipuro	17.927	17.825	35.752
Jatiyoso	20.232	20.196	40.428
Jumapolo	22.327	21.995	44.322
Jumantono	25.772	25.709	51.481
Matesih	22.838	22.928	45.766
Tawangmangu	23.937	24.410	48.347
Ngarogoyo	19.077	19.078	38.155
Karangpandan	22.135	22.778	44.913
Karanganyar	43.271	44.115	87.386
Tasikmadu	34.699	35.096	69.795
Jaten	43.059	44.312	87.371
Colomadu	38.983	38.568	77.551
Gondangrejo	46.211	45.567	91.778
Kebakkramat	32.665	33.406	66.071
Mojogedang	36.207	36.501	72.708
Kerjo	19.277	19.471	38.748
Jenawi	13.857	14.055	27.912
Karanganyar	482.474	486.010	968.484
<i>Hasil Proyeksi¹/Projection Result¹</i>			

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar rata-rata mencapai 1.260 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Colomadu sebesar 4.959 jiwa/km², diikuti Kecamatan

Jaten dengan 3.420 jiwa/km² dan Kecamatan Tasikmadu 2.529 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah ada di Kecamatan Jenawi dengan 498 jiwa/km², diikuti Kecamatan Ngargoyoso dengan 584 jiwa/km² dan Kecamatan Jatiyoso dengan 602 jiwa/km².

Tabel 2.3 Jumlah Kepadatan Penduduk dan Ratio Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Kecamatan District	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio
(1)	(4)	(5)	(6)
Jatipuro	3,69	1.040	100,57
Jatiyoso	4,17	602	100,18
Jumapolo	4,58	796	101,51
Jumantono	5,32	961	100,25
Matesih	4,73	1.742	99,61
Tawangmangu	4,99	690	98,06
Ngargoyoso	3,94	584	99,99
Karangpandan	4,64	1.317	97,18
Karanganyar	9,02	2.031	98,09
Tasikmadu	7,21	2.529	98,87
Jaten	9,02	3.420	97,17
Colomadu	8,01	4.959	101,08
Gondangrejo	9,48	1.616	101,41
Kebakkramat	6,82	1.812	97,78
Mojogedang	7,51	1.364	99,19
Kerjo	4,00	828	99,00
Jenawi	2,88	498	98,59
Karanganyar	100,00	1.261	99,27
<i>Hasil Proyeksi¹ / Projection Result¹</i>			

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2025, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Karanganyar mencapai 554.741 orang atau sekitar 96,74% dari total angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 74,57% pada tahun 2024 menjadi 74,81% pada tahun 2025. Jika dilihat dari status pekerjaan utama, sebanyak 239.300 orang atau 53% penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang berarti lebih dari separuh angkatan kerja bekerja di status pekerjaan tersebut. Proporsi terbanyak selanjutnya dengan 99.385 orang atau 18% bekerja sebagai wirausaha dan 72.664 orang atau 13% berusaha dengan bantuan pekerja

tidak tetap atau tidak dibayar. Dengan potensi sumber daya manusia yang ada, Kabupaten Karanganyar diharapkan mampu mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata secara lebih progresif.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar

2.2.1 Profil Disparpora Kabupaten Karanganyar

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu unsur pelaksana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas membantu Bupati Karanganyar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan daerah di bidang kepariwisataan. Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar menerangkan terdapat dua urusan yang ditangani yaitu urusan pilihan Pariwisata dan urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Keolahragaan. Pembentukan dinas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dari sektor pariwisata dan peningkatan daya saing daerah melalui pengoptimalaan potensi pemuda dan olahraga yang harapannya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, peningkatan pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar memiliki peran strategis dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini juga bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholders*, baik dari pemerintah, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disparpora memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karanganyar sebagai pusat pariwisata dan kebudayaan daerah”. Visi tersebut menunjukkan bahwa dinas ini mempunyai ambisi untuk membangun pariwisata yang kompetitif sambil tetap menjaga kebudayaan daerah sebagai bagian dari kepariwisataan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

2.2.2 Struktur Organisasi Disparpora Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Disparpora Kabupaten Karanganyar

Sumber : Disparpora.karanganyar.go.id

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, struktur organisasi Disparpora terdiri dari:

1. Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga sesuai dengan kebijakan Bupati Karanganyar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi penyusunan program, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan barang milik daerah. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum yang bertugas mengelola administrasi perkantoran, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dan tata usaha dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional yang menjalankan fungsi tertentu sesuai keahlian dan kompetensi di bidang administrasi maupun teknis.
3. Bidang Destinasi Wisata memiliki tugas melaksanakan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi wisata. Bidang ini membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang membantu dalam pelaksanaan tugas sesuai keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Bidang Pengembangan Pariwisata memiliki tugas melaksanakan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pariwisata. Bidang ini membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga memiliki tugas melaksanakan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemuda dan olahraga. Bidang ini membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan dalam bekerja dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang bekerja sesuai keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dinas dan memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional teknis tertentu di lapangan, seperti pengelolaan objek wisata atau fasilitas olahraga yang menjadi kewenangan dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian dan/atau Kepala Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Dalam kerangka kelembagaan Disparpora Kabupaten Karanganyar, setiap unit organisasi memiliki tugas pokok dan peran strategis dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Salah satu unit kunci adalah Bidang Destinasi Wisata yang memiliki fungsi, antara lain:

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang destinasi wisata;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang destinasi wisata;

- 3) pelaksanaan bimbingan teknis dan super visi destinasi wisata;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan destinasi wisata; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026, disusun secara selaras dengan visi dan misi daerah. Terdapat tiga fokus utama dalam sasaran ini yakni melestarikan dan mengembangkan seni, budaya daerah, dan benda-benda purbakala; meningkatkan dan dan mengembangkan daya tarik wisata seni dan budaya di daerah; serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah. Dalam konteks ini, Disparpora r memegang peran sentral dalam mengimplementasikan sasaran tersebut guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar.

2.3 Gambaran Umum Museum dan Cagar Budaya (MCB)

2.3.1 Profil Organisasi Museum dan Cagar Budaya

Museum dan Cagar Budaya (MCB) atau *Indonesia Heritage Agency* (IHA) merupakan unit pelaksana di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan museum dan situs cagar budaya nasional yang dibentuk pada tahun 2022 dan resmi menjadi BLU pada tahun 2023, BLU MCB bertanggung jawab atas pengelolaan 18 museum dan galeri serta 34 situs cagar budaya nasional di Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam

menjaga warisan budaya bangsa sekaligus menjadikannya sebagai sarana edukasi, penelitian, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya.

2.3.2 Visi dan Misi MCB

Visi : “Menjadi ruang jelajah warisan budaya dan sejarah yang bersifat kolaboratif dan mendorong daya cipta, perubahan sosial, serta pembangunan karakter yang berbudaya.”

Misi :

1. Mewujudkan pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan bangunan bersejarah yang berkelanjutan.
2. Melaksanakan upaya pelayanan dan pelibatan masyarakat secara terpadu.
3. Mengedepankan transformasi pengembangan wawasan melalui praktek edukasi yang inovatif dan pembangunan komunitas.
4. Menjalin kepercayaan kuat antara pemangku kepentingan yang berbasis kemitraan.
5. Mewujudkan ruang ekspresi dan interaksi budaya yang inklusif dan mudah diakses.
6. Mewujudkan tata kelola kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang tangkas dan berorientasi kepada dampak yang berkelanjutan.

2.3.3 Kelembagaan Organisasi MCB

Secara kelembagaan, Museum dan Cagar Budaya (MCB) memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai museum dan situs cagar budaya nasional yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Struktur organisasinya terdiri dari Kepala Museum, Dewan Pengawas, dan Unit Pengelola museum dan cagar budaya yang terdiri dari: PJ Unit Museum/Cagar Budaya, Pamong Budaya Ahli Muda, Kurator, Konservator, Administrasi Keuangan, Penata Pameran, Preparator, PPNPN Edukator, PPNPN Humas, PPNPN Kebersihan, serta PPNPN Keamanan di setiap unit museum dan cagar budaya nasional.

MCB merupakan lembaga yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berarti lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan layanan museum dan cagar budaya untuk memperoleh pendapatan, misalnya melalui penjualan tiket masuk, penyelenggaraan kegiatan edukasi, penyediaan fasilitas publik, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, orientasi utama dari penerapan sistem BLU bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pendapatan yang diperoleh pada dasarnya digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional, pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas pameran, serta pelestarian koleksi dan situs cagar budaya. Penerapan sistem BLU bertujuan untuk mendorong pengelolaan museum dan cagar budaya yang lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan

tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai sarana edukasi, penelitian, dan pelestarian warisan budaya nasional.

Pengelolaan MCB mencakup kegiatan konservasi, penelitian, penyajian koleksi, pengembangan program edukasi, hingga promosi destinasi wisata budaya. Berbagai objek wisata berbasis sejarah dan budaya berada di bawah pengelolaan lembaga ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Objek-objek tersebut umumnya berupa museum nasional, museum klaster, kawasan cagar budaya, serta pusat interpretasi sejarah yang memiliki nilai arkeologis dan historis tinggi. Salah satu kawasan penting yang dikelola adalah Situs Sangiran yang dikenal sebagai salah satu situs manusia purba penting di dunia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (World Heritage Site). Kawasan ini memiliki berbagai klaster museum yang berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, serta penelitian mengenai evolusi manusia dan kehidupan prasejarah.

Salah satu museum yang menjadi bagian dari pengelolaan MCB adalah Museum Manusia Purba Klaster Dayu yang berlokasi di Desa Dayu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Museum Dayu merupakan salah satu pusat interpretasi yang menampilkan berbagai informasi mengenai perkembangan kehidupan manusia purba, temuan fosil, serta kondisi lapisan tanah dan lingkungan pada masa prasejarah. Keberadaan museum ini memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pengembangan wisata budaya berbasis sejarah dan arkeologi di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pengelolaan Museum Manusia Purba Klaster Dayu pada awalnya dikelola oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran yang merupakan unit teknis di bawah Kemendikbudristek dari tahun 2014 hingga tahun 2021. Lalu di tahun selanjutnya, mulai tahun 2022 pengelolaan Museum Dayu beralih ke Museum dan Cagar Budaya (MCB) yang merupakan unit pelaksana di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian untuk sistem pengelolaan di setiap unit museum dan cagar budaya maka secara teknis pengelolaan museum ini dijalankan oleh Unit Klaster Museum Klaster Dayu yang berada di bawah naungan dan koordinasi antara Museum dan Cagar Budaya (MCB) dengan Disparpora Kabupaten Karanganyar. Manajemen operasional mencakup aspek keamanan, pemeliharaan fasilitas, serta penyediaan layanan pemandu wisata (guide) yang kompeten. Strategi pengelolaan yang diterapkan adalah dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dalam pengelolaannya, Unit Klaster Museum Dayu yang berada di bawah naungan MCB menerapkan pola pengelolaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara struktural, pengelolaan museum dan situs cagar budaya berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan RI melalui unit pelaksana yang bertanggung jawab atas operasional, pelestarian koleksi, serta pengembangan program kegiatan di setiap objek wisata. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan di lapangan, lembaga ini juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kerjasama tersebut dilakukan

dalam berbagai bentuk, seperti pengembangan kawasan wisata, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, promosi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan museum dan cagar budaya nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan pengelolaan museum dan situs cagar budaya nasional dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat di kawasan situs cagar budaya nasional termasuk di dalamnya adalah kawasan Situs Dayu.

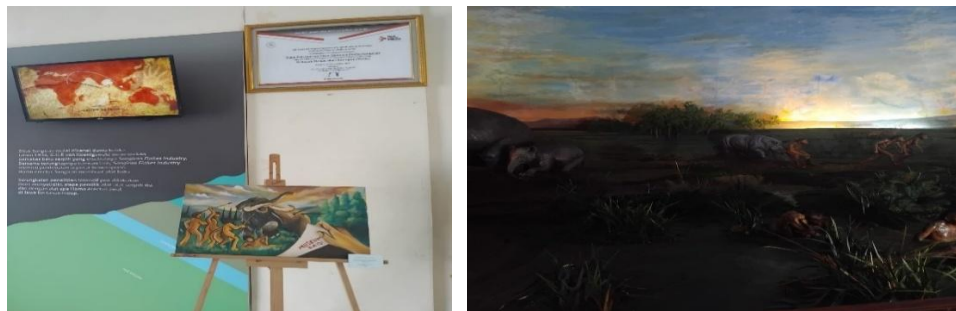
2.4 Gambaran Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu



Gambar 2.3 Locket dan Pintu Masuk Museum Manusia Purba Klaster Dayu
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2026

Museum Manusia Purba Klaster Dayu atau lebih dikenal dengan nama “Museum Dayu” merupakan salah satu unit pengembangan yang terintegrasi dalam kawasan Situs Warisan Dunia UNESCO *Sangiran Early Man Site*. Sebagai bagian dari ekosistem wisata budaya dan edukasi, museum klaster ini memegang peranan strategis dalam pelestarian nilai-nilai paleoantropologi serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Museum Dayu mulai dibangun pada tahun 2013 dan resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik

Indonesia ke-11, Prof. Dr. Boediono pada 19 Oktober 2014. Keberadaan museum klaster ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran fosil, tetapi juga sebagai pusat interpretasi sejarah evolusi manusia bagi masyarakat luas.



Gambar 2.4 Koleksi di Lobby dan Ruang Diorama Museum Dayu
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2026

Pembentukan Museum Dayu berakar pada pentingnya pelestarian situs Sangiran yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Mengingat tingginya nilai ilmiah dan historis pada Situs Dayu yang merupakan bagian dari Situs Sangiran maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang lebih tersegmentasi guna mengakomodasi jumlah pengunjung yang terus meningkat. Museum Dayu ini dikembangkan sebagai salah satu klaster yang bertujuan untuk mendistribusikan arus wisatawan dan menyediakan fasilitas edukasi yang lebih spesifik karena klaster ini utamanya menyajikan informasi mengenai lapisan tanah purba dan alat batu tertua beserta fosil dan hasil kebudayaan manusia purba yang ditemukan di Kawasan Situs Dayu.



Gambar 2.5 Lapisan tanah, ruang anjungan kabuh, dan ruang anjungan notopuro di objek wisata Museum Dayu

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2026

Keberadaan objek wisata Museum Dayu tidak hanya menjadi destinasi kunjungan berwisata, tetapi juga menjadi sarana belajar sejarah dan budaya mengenai kehidupan manusia purba dari benda-benda peninggalannya. Museum Dayu mayoritas dikunjungi wisatawan dari kalangan pelajar, mulai dari anak-anak sekolah hingga mahasiswa karena objek wisata ini lebih menonjolkan konsep wisata edukasi yang berfokus pada pembelajaran sejarah dan budaya. Untuk dapat menikmati layanan wisata, biaya tiket masuknya sebesar Rp.5.000,- per orang dan jika wisatawan ingin mendapatkan layanan tambahan seperti layanan edukasi dan pemanduan maka harus membayar biaya tambahan. Objek wisata ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 08.00 wib dan tutup pada jam 16.00 wib serta tidak buka di hari Senin karena di hari tersebut digunakan untuk pemeliharaan museum.



Gambar 2.6 Ruang Pamer 1 objek wisata Museum Dayu

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2026

Dalam hal fasilitas dan infrastruktur, Museum Dayu dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang yang dirancang untuk mendukung fungsi edukasi dan rekreasi. Fasilitas utama meliputi ruang pameran 1, satu ruang diorama, tiga ruang anjungan yaitu anjungan kabuh, notopuro, dan grenzbank yang menampilkan replika fosil, alat peraga interaktif, serta perangkat multi media yang menjelaskan kronologi kehidupan manusia purba. Selain itu, museum klaster ini juga dilengkapi area taman, area bermain anak, kebun binatang mini dengan koleksi rusa, jalur pejalan kaki, serta fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, dan pusat informasi pengunjung. Tata letak fasilitas dirancang sedemikian rupa dengan prinsip aksesibilitas untuk memastikan kenyamanan bagi pengunjung museum.



Gambar 2.7 Area taman, area bermain anak, jalur pejalan kaki, dan kebun binatang mini di objek wisata Museum Dayu

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2026